



Bisa Pakai KTP, Asal Tercantum di DPT

JOGJA – KPU Kota Jogja optimistis semua tahapan distribusi logistik pilpres bisa terkirimkan sesuai jadwal. Mulai hari ini, KPU Kota membagikan kartu undangan bagi pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Pada Pilpres 8 Juli mendatang, jumlah DPT di Kota Jogja tercatat sebanyak 341.935 pemilih. Jumlah itu naik sebanyak 12.240 pemilih dibandingkan pemilu legislaif, 9 April lalu.

Menurut anggota KPU Kota Jogja Titok Hariyanto, dari 12.240 itu, sekitar 11 ribu di antaranya adalah pemilih luar daerah yang akan memberikan suara di Kota Jogja. Mereka antara lain para mahasiswa dan pendatang. "Selain itu, terdapat sekitar seribu lebih pemilih yang berasal dari pemilih pemula dan warga baru," terang Titok di sela audiensi KPU Kota Jogja dan Komisi I DPRD Kota Jogja kemarin (4/7).

Dia memastikan, semua pemilih yang masuk dalam DPT mendapatkan kartu undangan memilih. Tapi bagi pemilih yang tidak menerima bisa meminta ke KPPS setempat. Dan bagi yang tidak mempunyai undangan padahal namanya tercatat dalam DPT, yang bersangkutan bisa menggunakan kartu identitas masing-masing (KTP, SIM) sebagai gantinya.

"Dengan catatan namanya ada dalam DPT," ingatnya. Sedangkan warga yang hanya membawa formulir A-7 bisa langsung

membawanya ke TPS masing-masing.

Persoalan DPT menjadi masalah yang banyak disorot dalam audiensi antara KPU Kota Jogja dan DPRD ini. Kalangan dewan berharap, kasus DPT yang terjadi saat pileg lalu tidak akan terulang di Kota Jogja. Terkait ini, KPU Kota Jogja menjamin DPT tidak akan menjadi masalah, sebab sudah dilakukan beberapa kali verifikasi.

"Bahkan, kami juga melibatkan banyak cara, termasuk melibatkan masyarakat secara langsung," tambah anggota KPU Kota Jogja Sunaji.

Di bagian lain, menjelang hari pemungutan suara pilpres, puluhan pemilih pemula kemarin mengikuti workshop Penguatan Pemilih Pemula di Hotel BIFA. Menurut staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Saifudin, kelompok pemilih pemula adalah kelompok yang lebih kritis dibanding kelompok pemilih lainnya sehingga berpeluang besar untuk menjadi golput. "Meskipun pemilu adalah hak, akan lebih bertanggung jawab jika warga negara menggunakan hak pilihnya dalam proses demokratisasi dalam penyelenggaraan negara Indonesia," katanya.

Mantan Ketua KPU Kota Jogja Miftahul Alvin selaku penyelenggara workshop menjelaskan, pemilih pemula yang akan terlibat dalam pemilu presiden dan wakil presiden adalah sasaran strategis yang perlu diperhitungkan oleh tim kampanye masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. (din)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 19 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005